

Judul : Bromo kembali terbakar, Kemenhut diminta kendalikan Karhutla
Tanggal : Rabu, 16 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Bromo Kembali Terbakar Kemenhut Diminta Kendalikan Karhutla

ANGGOTA Komisi IV DPR Jaelani meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengambil langkah cepat melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Terbaru kebakaran hutan ini menghancurkan kawasan Sabana Pengol di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur (Jatim) sebelum akhirnya meluas hingga ke area Jemplang, Kabupaten Malang, Jatim.

"Kemenhut tidak boleh lagi beralasan karena faktor alam sebagai pemicu kebakaran. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sejak jauh hari telah mengingatkan adanya potensi karhutla akibat anomali cuaca yang kuat," ujar Jaelani di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Sebelumnya, area sabana di Blok Pengol, Kabupaten Probolinggo kawasan TNBTS kembali terbakar pada Kamis (10/9/2026). Kebakaran semakin meluas hingga ke area Jemplang, Kabupaten Malang, pada Minggu (13/9/2026). Akibatnya, kawasan wisata Gunung Bromo di TNBTS ditutup total untuk seluruh aktivitas wisata mulai Sabtu, 12 September 2026.

Jaelani melanjutkan, insiden yang terus berulang menunjukkan adanya kelemahan serius dalam tata kelola pencegahan serta penanggulangan bencana di kawasan konservasi nasional. Karena itu, Kemenhut didesak segera mengevaluasi dan memperjelas standar operasional pengawasan di lapangan. Seperti patroli, deteksi dini, dan respons cepat pada titik rawan kebakaran.

sehingga kebakaran kawasan tidak terus berulang.

"Kemenhut juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas tata kelola pencegahan dan penanggulangan karhutla di kawasan TNBTS. Karena, kejadian ini bukanlah yang pertama kali," tegas politisi PKB ini.

Selain itu, ia mendorong Kementerian terkait untuk memperkuat sistem deteksi dini berbasis teknologi modern untuk mengantisipasi perluasan titik api di masa mendatang. Penggunaan data spasial dan citra satelit dinilai menjadi keharusan agar respons penanganan bisa dilakukan secara lebih cepat dan terukur.

"Tentunya dengan menetapkan indikator peringatan dini dan prosedur penutupan kawasan berdasarkan tingkat risiko yang terukur," imbuh legislator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) ini.

Jaelani menambahkan, penetapan prosedur mitigasi yang jelas dan transparan sangat penting bagi kelangsungan ekosistem maupun sektor pariwisata. Kebijakan mitigasi yang komprehensif diyakini mampu menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan kawasan konservasi di tanah air.

Bagaimana tanggapan Kemenhut? Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan, penanganan kebakaran di kawasan TNBTS membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Kemenhut membentuk tim khusus yang melibatkan ahli dan akademisi untuk memastikan proses verifikasi lapangan dilakukan berdasarkan bukti ilmiah. ■ TIF